

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang secara langsung menghubungkan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah Inten dilakukan oleh Meutia dan Liliana(2017).

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif pada bukunyaHalim ( 2007).

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi

keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat dilakukan oleh Dewi et al, (2015).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat ditunjukkan melalui penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dibuat sesuai standar akuntansi. Kualitas informasi dalam laporan keuangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal dilakukan oleh Dewi et al, (2015).

Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya isu tentang korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa divonis 17 bulan penjara. Aksi perangkat desa yang menyalagunakan wewenangnya, melalui kegiatan fiktif untuk meraup keuntungan pribadi. (Bisnis.com) pada (13 april 2020). Yang kedua Presiden (Jokowi) langsung merespons curhatan para kepala desa yang meminta adanya dana operasional di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pemerintah Desa se-Indonesia, di Stadion Tenis Indoor, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). "Soal kesejahteraan, dana operasional segera akan saya matangkan, putuskan. Sehingga ini tidak merepotkan dan membebani bapak ibu semua," (Jokowi). Dan menyepakati memang para kepala desa membutuhkan dana operasional termasuk untuk mengawasi penggunaan dana desa di lapangan sehingga betul-betul efektif. (Tribunnews.com). Gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan Hamengk Bowono x mengaku prihatin atas

munculnya kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa pada (5 desember 2019) di (bisnis.com). Fokus utama peneliti dalam pengambilan judul ini adalah pentingnya dana desa bagi masyarakat serta pengelolaannya yang kurang dipahaminya. Hasil pengamatan isu di atas yang telah dipaparkan menjadi salah satu alasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan konten isu diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang berdampak pada Pengaruh *Capital Budget* Dan Laporan Operasional Terhadap Peningkatan Transparansi Keuangan Desa. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Apriliani et al, (2015), penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rigian & Sari(2019), akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh positif terhadap variabel kinerja anggaran serta penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Magelang(2017) laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah..

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji Pengaruh *Capital Budget* Dan Laporan Operasional Terhadap Peningkatan Transparansi Keuangan Desa, menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP hasil penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Triastuti et al, (2018), Penganggaran Modal ( $X_1$ ), dan (Y) Investasi dengan hasil penelitian yaitu *capital budgeting* belum dapat meningkatkan nilai keputusan investasi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 nilai DER dapat meningkatkan nilai keputusan investasi. Yang artinya

bahwa *capital* budgert tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi karena adanya faktor yang mempengaruhi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Puspaningrum dan Riyardi (2020), yaitu Evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran dipemerintah provinsi sulawesi utara , Perencanaan ( $X_2$ ), Penganggaran (Y), hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa program kegiatan yang belum konsisten adanya perencanaan dan penganggaran, karena hasil evaluasi tidak mencapai target yang signifikan. Yang artinya bahwa keterbatasan anggaran dalam perencanaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tiap jenis Laporan Keuangan tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan informasi keuangan dari seluruh entitas pada pemerintah pusat. Pada Laporan Operasional disajikan data pendapatan dan beban Pemerintah Pusat pada satu periode yang disusun secara akrual. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca memiliki keterkaitan satu sama lain dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Neraca, masyarakat dapat mengetahui posisi keuangan pemerintah pusat, serta besaran uang/kas dan jumlah aset tetap yang dimiliki pemerintah. Dengan melihat neraca masyarakat juga mengetahui jumlah investasi yang dimiliki pemerintah, dan mengetahui jumlah utang pemerintah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh *Capital Budget* Terhadap Transparansi Keuangan Desa?
2. Apakah terdapat pengaruh Laporan Operasional terhadap Transparansi Keuangan Desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Capital Budget* Terhadap Transparansi Keuangan Desa
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Laporan Operasional terhadap Terhadap Transparansi Keuangan Desa

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Semoga penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang *capital budget* dan laporan operasional berpengaruh simultan terhadap transparansi keuangan desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenisnya.

### 1.4.2 Manfaat praktis

Dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *capital budget* dan laporan operasional terhadap peningkatan transparansi keuangan desa se-kecamatan Sukamaju Selatan.

## 2. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan kajian untuk mahasiswa akuntansi tentang pengaruh *capital budget* dan laporan operasional terhadap peningkatan transparansi keuangan desa.

## 3. Bagi Desa Se-Kecamatan Sukamaju Selatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memaksimalkan *capital budget* dan laporan operasional terhadap peningkatan transparansi keuangan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Agency Theory**

Teori keagenan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat suatu kontrak. *Agency Theory* pertama kali dicetuskan oleh Jansen dan Meckling (1976) dalam penelitian yang dilakukan oleh Amis et al,(2020). Teori ini membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendeligasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut kontrak kerjasama yang disebut "*nexus of contract*". Moe (1984) menjelaskan konsep ekonometrika organisasi sektor publik dengan menggunakan *agency theory*. Berdasarkan *agency theory* dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Hal ini bertujuan untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, yang dikemukakan oleh Yuliani dan Magelang(2017) Implikasi teori keagenan adalah dalam transparansi keuangan daerah, pihak yang dipercaya mengelola dana desa adalah aparat pemerintah desa. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pengamatan pengelolaan

dana desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Aparat desa harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara menyeluruh. Kompetensi aparat desa pemerintah desa dan kepentingan kepala desa akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa.

## **2.2 Accountability Theory**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatkan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan pemerintah yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu pemerintah. Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan dana desa. Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, serta tanggapan terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintah, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai sesuatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan pada bukunya Utary(2014).

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintah sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan oleh Mulgan dan Sinclair pada penelitian yang dilakukan oleh Asropi (2020), akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan

terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana dikemukakan adanya penyalagunaan kewenangan. Schledler dalam bukunya Utary (2014).

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *accountability theory* yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi. Hal ini berhubungan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini yaitu aksi perangkat desa yang menyalagunakan wewenangnya, melalui kegiatan fiktif untuk meraup keuntungan pribadi. Yang seharusnya untuk pencapaian tujuan kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **2.3 Capital Budget**

Modal (*capital*) menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, sedangkan anggaran (*budget*) adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. *Capital budget* adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Secara defenisif yang dimaksud dengan *capital budgeting* adalah merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Investasi juga berarti pengeluaran pada saat ini dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut baru akan diterima lebih dari satu tahun mendatang penelitian dilakukan oleh Sukayasih et al, (2019).

*Capital Budget* adalah proses untuk menentukan manakah [investasi](#) sesungguhnya yang harus diterima dan layak untuk mendapatkan alokasi pendanaan dari perusahaan. Untuk mengevaluasi proses penganggaran modal, maka harus konsisten dengan tujuan pemilik perusahaan yang paling utama yaitu memaksimalkan keuntungan dan kekayaan para pemilik perusahaan dilakukan oleh Wedasari dan Sukawijaya (2019).

Adapun pengertian Anggaran Sektor Publik menurut fremee dikutip oleh Nordiawan, (2003) dalam bukunya Pratiwi(2016)menjelaskan bahwa anggaran publik adalah sebuah proses yang dilaksanakan organisasi sektor untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas ( *the process of allocation resources to unlimited demand* ). Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana *financial* yang menyatakan, rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

*Capital budgeting* merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengevaluasian terhadap rencana penanaman modal atau investasi yang mampu menambah nilai perusahaan sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan dalam jangka waktu panjang penelitian yang dilakukan oleh Andini(2020).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

APBD mempunyai fungsitorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan menjadi hak dan pengeluaran menjadi kewajiban negara dalam tahunan anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

Umumnya anggaran negara dapat diklasifikasikan atas 2 kategori:

**Anggaran Berimbang (*Balanced Budgeting*)**

Anggaran berimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak atau sejenisnya, yaitu suatu kondisi dimana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah

**Anggaran Tidak seimbang (*Unbalanced Budgeting*)**

Anggaran tidak seimbang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran belanja yang tidak seimbang biasanya akan mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap pendapatan nasional.

## 2.4 Prinsip-Prinsip Penganggaran

Salah satu prinsip-prinsip anggaran yang dijadikan indikator yaitu:

**Demokratis**, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun dipemerintah Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

**Adil**, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proposional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

**Transparan**, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum dalam bukunya Hasanah, (2017).

## 2.5 Laporan Operasional

PSAP No. 12 Laporan Operasional Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk

menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut.

### **Penyajian Laporan Operasional**

Adapun beberapa penyajian laporan operasional dan dijadikan sebagai indikator yaitu sebagai berikut:

#### **Pendapatan-LO Dari Kegiatan Operasional**

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

#### **Beban Dari Kegiatan Operasional.**

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **Transfer**

Beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Surplus/Defisit Dari Kegiatan Dan Operasional**

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

### **Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik yaitu, kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah

### **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas dilakukan oleh Triputra dan SE(2019).

## **2.6Transparansi Keuangan**

Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturan bersifat bebas, jelas dan terbuka transparansi berasal dari kata

transparan yang memiliki arti: tembus cahaya; tembus pandang; bening (bila penggunaannya pada objek seperti kaca) yang penggunaannya sering terhadap suatu benda/ objek yang berbentuk tipis atau tampak bening pada penglihatan. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang / akan diambil di dalam institusi tersebut penelitian yang dilakukan oleh Syafa'ah (2019).

“Mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”, Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan oleh Syafa'ah (2019). Transparansi yaitu dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kerana masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan pada bukunya Mursyidi (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Indriani 2019) mengungkapkan dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.



### Mengukur tingkat keterbukaan

Proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh- tempuh harus dipublikasikan secara terbuka secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.

### Prosedur pelayanan

Dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat *''simple, strainghtforward and easy to apply''* (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel2.1** PenelitianTerdahulu

No	Penelitian Dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	Riski Amalia Sugista Dan Tahun 2017	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa	<b>Independen:</b> Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat <b>Dependen:</b> Pembangunan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan
2.	Detasya regian, ratna purnama sari dan 2019	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi	<b>Independen:</b> Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi	Hasil analisis data dapat disimpulkan, pertama akuntabilitas,

		Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i>	<b>Dependen:</b> Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i>	transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja anggaran, kedua pengawasan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja anggaran berbasis value for money atas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya memasukkan 4 dari 9 prinsip <i>good corporate governance</i> sebagai variabel independen.
3.	Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta dan 2015	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas	<b>Independen:</b> Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif,	Hasil analisis, semua regresi lulus dalam uji asumsi klasik. Penelitian ini menemukan bahwa penyajian laporan keuangan,

		Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah	<b>Dependen:</b> Aksesibilitas Transparansi	karakteristik kualitatif laporan keuangan dan akseibilitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan
4.	M.Shodiqul Amin, Supriadi, Nurdiana Fitri Isnaini dan 2019	Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Transparansi Laporan Keuangan	<b>Independen:</b> Komitmen Manajemen , Kapasitas Sumber Daya Manusia  <b>Dependen:</b> Transparansi Laporan Keuangan	Hasil penelitian berdasarkan Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh intrumen penelitian dikatakan valid dan reliabel. Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan didapatkan hasil tingkat signifikan uji $f_{0,000} < 0,05$ (level of signifikan dan secara parsial didapatkan data

				<p>variabel independen (komitmen manajemen kapasitas sumber daya manusia) mempunyai nilai &lt; 0,05 sehingga dapat dinyatakan secara parsial dan simultan kedua variabel independen terhadap transparansi keuangan. Berdasarkan nilai koefisien beta menunjukkan variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh paling signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dengan nilai yang paling besar yaitu 4,14</p>
5.	Heny Triastuti	Analisis <i>Capital Budgeting</i> Dalam	<b>Independen:</b> Penganggaran	Dari analisis data pada pembahasan

	Ningsih dan Sonia Faradiba 2018	Peningkatan Keputusan Investasi	Modal, Biaya, Profitabilitas  <b>Dependen:</b> Investasi	maka dapat dilihat bahwa <i>capital budgeting</i> belum dapat meningkatkan nilai keputusan investasi pada tahun 2014 dan 2016, 2015 nilai DER dapat meningkatkan nilai keputusan investasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keputusan investasi perusahaan antara lain: stabilitas penjualan, struktur aktiva, struktur pendanaan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat, kondisi pasar,
--	--	---------------------------------------	--	--

				kondisi internal perusahaan, fleksibilitas keuangan.
6.	Nur laila yuliani, 2017	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	<b>Independen:</b> Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal. <b>Dependen:</b> Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah objek tersebut sudah memenuhi karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam laporan keuangan dan sudah menerapkan

				<p>pengendalian internal yang baik. Tetapi masih perlu meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas, agar dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan memperhatikan.</p>
7.	<p>Maria Magdalena Hesti Kurniawati, 2016</p>	<p>Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p><b>Independen:</b> Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <b>Dependen:</b> Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan semakin baik</p>

			Keuangan Daerah	penyajian laporan keuangan daerah serta semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan mewujudkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
8.	Nina Rosalin Siahaan, 2017	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<b>Independen:</b> Akuntabilitas Dan Transparansi <b>Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan uji t : transparansi secara parsial signifikan terhadap laporan keuangan daerah. Uji t: akuntabilitas, transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan
9.	Kumalasa ri (2016)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan	<b>Independen:</b> Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi



		Alokasi Dana Desa	Desa <b>Dependen:</b> Pengelolaan Alokasi Dana Desa	berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
10	Putra Adi Kurniawan (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	<b>Independen:</b> Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa <b>Dependen:</b> Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
11	Anwar, Misbahul Jatmiko, Bambang (2016) <ul style="list-style-type: none"><li>• Anwar M</li><li>• Jatmiko B</li></ul>	Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel	<b>Independen:</b> Kontribusi, Peran Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Anggaran <b>Dependen:</b> Transparansi	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait dengan pemahaman desa terhadap laporan keuangan, ada dua desa yang memiliki pemahaman yang baik, Sukoharjo

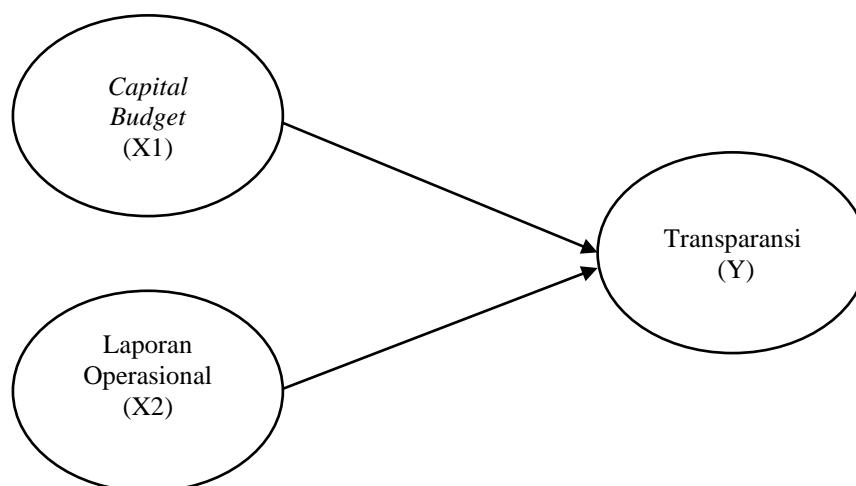
				<p>dan Minomartani, terkait dengan penerapan APBD yang paling baik adalah desa Minomartani, terkait dengan pemahaman Dari teknologi web, dapat disimpulkan bahwa Desa Sinduharjo sebagai desa dengan pemahaman terbaik, berkaitan dengan peran partisipasi masyarakat, bahwa Desa Minomartani termasuk salah satu desa yang memiliki keterlibatan paling baik, terkait dengan aturan hukum, bahwa Desa Sinduharjo termasuk desa memiliki aturan hukum yang tertib, desa yang</p>
--	--	--	--	--

				<p>memiliki tingkat transparansi terhadap pelaporan keuangan adalah desa Minomartani, desa yang memiliki tingkat respons yang paling baik adalah desa Sariharjo Desa yang memiliki konsensus yang baik adalah desa Sariharjo, sedangkan desa yang memiliki ekuitas terbaik adalah desa Sariharjo, desa pada memiliki efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran desa adalah desa Sariharjo, desa yang memiliki tingkat akuntabilitas terbaik untuk</p>
--	--	--	--	---

				pelaporan keuangan dan yang lainnya adalah desa Donoharjo.
--	--	--	--	--

## 2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang di atur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti, dimana membantu peneliti menguraikan secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



### Keterangan:

→ = Pengaruh Parsial

**Gambar 2.1:** Kerangka Konseptual

## 2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan tinjauan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### **Pengaruh *Capital Budget* Terhadap Transparansi.**

*Capital budget* yaitu garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap yang memiliki indikator yaitu demokratis, adil dan transparan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati(2018), yaitu tentang anggaran terhadap transparansi kebijakan publik, prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah antara lain akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik dalam bukunya Suhardjo(2000), sehingga menunjukkan bahwa variabel *capital budget* berpengaruh positif terhadap transparansi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diangkat hipotesis yaitu:

H<sub>1</sub> : Diduga bahwa *capital budget* berpengaruh signifikan terhadap transparansi.

### **Pengaruh Laporan Operasional Terhadap Transparansi.**

Dalam Laporan Operasional yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional, yang memiliki beberapa penyajian laporan operasional yaitu, Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, transfer, surplus/defisit dari kegiatan dan operasional, Pos luar biasa dan surplus/defisit-LO. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015), menunjukkan bahwa variabel laporan operasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diangkat hipotesis yaitu :

H<sub>2</sub>: Diduga bahwa Laporan Operasional Berpengaruh Signifikan Terhadap Transparansi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei, yaitu penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk melihat pengaruh variabel *independent* dan terhadap variabel *dependent* berdasarkan data yang ada dan disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi dan kejadian yang ada.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Se-kecamatan Sukamaju Selatan. Dengan jangka waktu penelitian 2 (Dua) bulan.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya pada bukunya Sugiyono (2013).

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi populasi adalah perangkat desa yang berada di Kantor Desa Se-Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjumlah 11 Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di kantor Desa Se-kecamatan Sukamaju Selatan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah

yaitu Kepala Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi untuk penyebaran kuesioner adalah Aparatur Pemerintah Desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 106 Aparatur Pemerintah Desa yang bekerja pada Kantor Desa yang ada di kecamatan Sukamaju Selatan, sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Daftar Nama Desa Dan Jumlah Populasi

No.	NAMA DESA	RESPONDEN
1	MULYOREJO	8
2	RAWAMANGUN	13
3	PAOMACANG	7
4	WONOKERTO	10
5	SUMBER BARU	9
6	BANYUWANGI	7
7	SUBUR	11
8	LINO	10
9	SIDOHARJO	13
10	SUKAMUKTI	8
11	SUKAHARAPAN	10
<b>JUMLAH POPULASI</b>		106

Sumber Data: Desa Se-Kecamatan Sukamaju Selatan, 2020

### 3.3.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya dilakukan oleh Sugiyono (2013). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa se-Kecamatan Sukamaju Selatan sebanyak 87 pegawai. Pengambilan sampel dilakukan

berdasarkan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2** KriteriaPemilihanSampel

No.	Kriteria
1	Perangkat Desa Yang Terdiri Dari Kepala, Sekretaris, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Kesra Dan Pelayanan, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan Dan Kepala Dusun.
2	Aparat Desa yang memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun.

Berikur daftar nama desa sebagai sampel penelitian ini:

**Tabel 3.3**DaftarNamaDesa Dan JumlahSampel

No.	NAMA DESA	Jumlah Responden Yang Memenuhi Kriteria
1	MULYOREJO	7
2	RAWAMANGUN	10
3	PAOMACANG	6
4	WONOKERTO	10
5	SUMBER BARU	8
6	BANYUWANGI	4
7	SUBUR	9
8	LINO	8
9	SIDOHARJO	10
10	SUKAMUKTI	5
11	SUKAHARAPAN	10
<b>JUMLAH SAMPEL</b>		87

Sumber data: Desa Se-Kecamatan Sukamaju Selatan, 2020

Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 106 ekslamplar, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 82% adapun rincihan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.4** Pengumpulan Data Primer Penelitian

No	Keterangan	JumlahKuesioner	Presentase %
1.	DistribusiKuesioner	106	100%
2.	KuesionerKembali	87	82%
3.	Kuesioner Cacat/Tidak Kembali	19	18%
4.	Kuesioner yang dapatdiolah	87	82%
n sampel yang kembali = 87			
Responden rate = $87 \times 100\%$			
106			
= 82%			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Responden dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa yang bekerja di kantor Desa Se-kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada semua kantor Desa di Kecamatan Sukamaju Selatan sebanyak 106 eksamplar dan diberikan pada aparat Pemerintah Desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Dari 106 kuesioner yang dibagikan kepada Aparat Pemerintah Desa yang kerja di Kantor Desa Se-kecamatan Sukamaju Selatan, terdapat 19 kuesioner yang cacat atau tidak kembali dikarenakan pada saat dilakukan penelitian tidak semua Aparat Desa berada ditempat. Sebanyak 87 Aparat Pemerintah Desa yang bekerja di Kantor Desa Se-kecamatan Sukamaju Selatan berhasil dikumpulkan sebagai responden dalam penelitian.

Demografi responden dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.5** Demografi Responden

<b>Keterangan</b>	<b>Jumah (orang)</b>	<b>Persentase(%)</b>
<b>Jenis Kelamin :</b>		
a. Laki-laki	60	69%
b. Perempuan	27	51%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
a. SMA/Sederajat	15	66%
b. Strata -1 (S1)	29	33%
c. Strata -2 (S2)	1	1%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer diolah, 2020

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari kuisisioner yang diberikan kepada para aparat desa yang bekerja pada kantor desa se-kecamatan Sukamaju Selatan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisisioner (*Questionnaire*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan terkait dengan objek yang akan diteliti, kepada pihak yang berwenang yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### 3.6 Analisis Data

#### 3.6.1 Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah mencari pengaruh antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dua atau lebih variabel

independen akan mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu regresi linear berganda merupakan metode yang akan meneliti ada atau tidaknya hubungan antara satu kejadian dengan sejumlah kejadian yang lain. Persamaan regresi linear yang terdiri dari dua variabel bebas. Sapar (2017) regresi linear berganda yaitu :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana Y = Transparansi Keuangan Desa

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien regresi

$X_1$  = *Capital Budget*

$X_2$  = Laporan Operasional

e = Standar Error

### Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Variabel X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Variabel Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan adalah:

- a. Jika nilai signifikan < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y, dan sebaliknya.

- b. Jika nilai signifikan  $>$  dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2016).

### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, maka instrumen harus diuji terlebih dahulu. Tujuan pengujian instrumen ini adalah untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumennya sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya instrumen yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian.

#### **Uji Validitas**

Validitas atau tingkat ketepatan adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang ingin kita ukur setelah data dikumpulkan, maka pengujian validitas dilaksanakan dengan mengkorelasikan skor-skor setiap item pertanyaan dengan skor total Sapar (2017).

#### **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah tingkat kepenelitian yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat dipercaya bila suatu alat pengukur dipakai dua

kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel Sapor(2017).

### **3.6.3 Statistik Deskriptif.**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau gambaran data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas Sugiyono(2013).

### **3.6.4 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali(2016). Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil kolmogorov-Sminov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

#### **Uji Multikolineritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen (bebas) yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat kolerasi diantara variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance di atas 0,10 atau nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas Ghozali(2016).

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan mneguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas berupa grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan nilai residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali(2016).

### **3.7 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional**

Teori adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang paling mendasar dan menjadi proses dari keseluruhan penelitian yang

akan dilakukan. Kemudian untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, maka akan dijelaskan skema dari kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:

### **3.7.1 Capital Budget**

*Capital Budget* merupakan suatu perencanaan yang menghasilkan rencana rinci yang mengalirkan kas masuk yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

### **3.7.2 Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

### **3.7.3 Transparansi**

Transparansi adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan sukamaju selatan ialah wilayah transmigrasi dan merupakan kecamatan baru di awal tahun 2019 di kabupaten luwu utara. Secara geografis kecamatan sukamaju selatan berbatasan dengan sebelah utara kecamatan sukamaju, sebelah timur kecamatan bone-bone, sebelah selatan kecamatan malangke, sebelah barat kecamatan mappedeceng. Dengan potensi sebagian besar masyarakatnya adalah petani padi dan sawit. Adapun 11 desa yang termasuk di Kecamatan Sukamaju selatan yaitu: Desa Mulyorejo yang terdiri dari 8 Dusun, 28 RT, jumlah penduduk sebanyak 3.516 jiwa dengan luas wilayah 628 Ha, Desa Rawamangun terdiri dari 6 Dusun dan 20 RT dengan luas 600 km<sup>2</sup>. Desa Paomacang yang terdiri dari 3 Dusun, 9 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 901 jiwa dan luas wilayah 4,11 km<sup>2</sup>. Desa Wonokerto yang terdiri dari 6 Dusun, 12RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.622 jiwa dan luas wilayah 550 km<sup>2</sup>. Desa Sumber Baru yang terdiri dari 3 Dusun 10 RT dengan luas 560 km<sup>2</sup>. Desa Banyuwangi yang terdiri dari 3,Dusun 9 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.542 jiwa dan luas wilayah 545 km<sup>2</sup>. Desa Subur yang terdiri dari 4 Dusun, 12 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1.175 jiwa dan luas wilayah 5,52 km<sup>2</sup>. Desa Lino yang terdiri dari 3 Dusun, 10 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 726 jiwa dan luas wilayah 10,70 km<sup>2</sup>. Desa Sidoharjo yang terdiri dari 4 dusun 12 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1.866 jiwa dan luas wilayah 2,75 km<sup>2</sup>.



Desa Sukamukti yang terdiri dari 3 Dusun 8 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 1251 jiwa dan luas wilayah 2.68 km<sup>2</sup>. Desa Sukaharapan yang terdiri dari 3 dusun 8 RT dengan jumlah penduduk 756 jiwa dan luas wilayah 2,78 km<sup>2</sup>.

Adapun Visi dan Misi Desa ialah agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategi Desa yaitu dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dijabarkan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) tahunan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah secara partisipatif.

### **Visi**

“ Mamajukan Warga Desa Aman Dan Damai Serta Hidup Rukun Antar Suku  
Dan Umat Beragama “

### **Misi**

- a. Memaksimalkan peran aparat desa
- b. Koordinasi antar pemerintah desa dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda pada setiap pengambilan langkah kebijakan.
- c. Musyawarah satu-satunya landasan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat.
- d. Pemberdayaan PKK, Pemuda, RT dan hansip serta memotivasi kelompok tani dan kegiatan keagamaan.

## 4.2 Deskripsi Statistik

Deskripsi Statistik digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk memahami hasil statistik deskriptif dari setiap variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Hasil Uji Analisis Deskripsi Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CB	87	41	60	50,00	5,193
L O	87	,27	,45	37,00	4,559
Transparansi	87	,33	,50	41,00	3,631
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data diolah spss, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat 87 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Transparansi sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 0,33 dengan nilai maksimum sebesar 0,50, sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) adalah 41,00 dengan standar deviasi 3,631. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai yang rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini berarti bahwa simpangan data pada variabel Transparansi tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum dan minimum Transparansi.

*Capital Budget (CB)* mempunyai nilai minimum 0,41 dan nilai maksimum sebesar 0,60. Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai meannya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan sehingga tidak ada kesenjangan yang cukup

besar dari CB terendah dan tertinggi. Begitu juga dengan Laporan Operasional (LO) . Dari tabel 4.1 terlihat bahwa nilai standar deviasi dari LO dan *Capital Budget* lebih kecil dari nilai meannya sehingga menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari LO , Transparansi terendah dan tertinggi.

### Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment person correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai item dari *corrected Item – Total Correlation* > dari  $r_{tabel}$  pada signifikan 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut.

**Tabel 4.2** Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>Capital Budget</i>	X1.1	0.409	0,208	Valid
	X1.2	0.629	0,208	Valid
	X1.3	0.54	0,208	Valid
	X1.4	0.384	0,208	Valid
	X1.5	0.637	0,208	Valid
	X1.6	0.695	0,208	Valid
	X1.7	0.645	0,208	Valid
	X1.8	0.583	0,208	Valid
	X1.9	0.591	0,208	Valid
	X1.10	0.621	0,208	Valid
	X1.11	0.687	0,208	Valid
	X1.12	0.493	0,208	Valid
	X2.1	0.550	0,208	Valid

Laporan Operasional	X2.2	0.662	0,208	Valid
	X2.3	0.687	0,208	Valid
	X2.4	0.764	0,208	Valid
	X2.5	0.653	0,208	Valid
	X2.6	0.653	0,208	Valid
	X2.7	0.608	0,208	Valid
	X2.8	0.760	0,208	Valid
	X2.9	0.531	0,208	Valid
Transparansi	Y1	0.666	0,208	Valid
	Y2	0.620	0,208	Valid
	Y3	0.586	0,208	Valid
	Y4	0.257	0,208	Valid
	Y5	0.308	0,208	Valid
	Y6	0.546	0,208	Valid
	Y7	0.630	0,208	Valid
	Y8	0.541	0,208	Valid
	Y9	0.466	0,208	Valid
	Y10	0.551	0,208	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* >  $r$  tabel pada signifikan 0,05 (5%).

### ***Hasil Uji Reabilitas***

Realibilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* > 0,60.

**Tabel 4.3** Hasil Uji Reabilitas

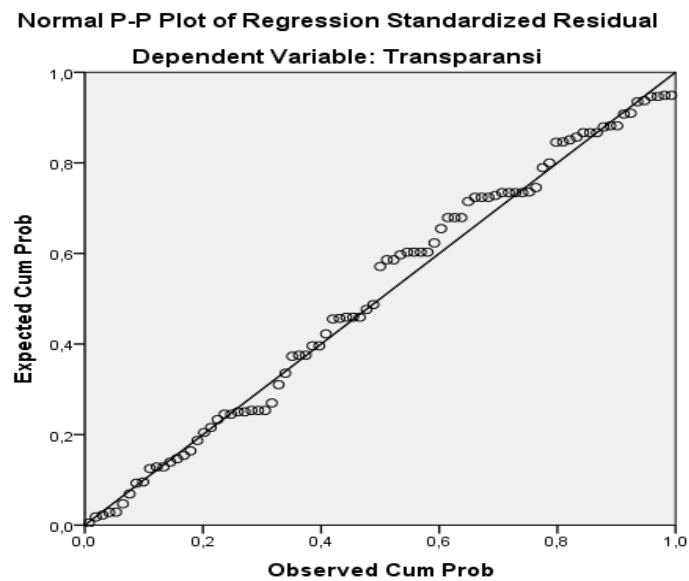
<b>Variabel</b>	<b><i>Alpha Cronbach's</i></b>	<b>Batas Reliabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Capital Budget</i> ( $X_1$ )	0,643	0,60	Reliabel
Laporan Operasional ( $X_2$ )	0,758	0,60	Reliabel
Transparansi (Y)	0,716	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah disps, 2020

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

### **Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis uji normalitas probability plot di spss dan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis probability plot.



**Gambar 4.1** Hasil Uji Statistik Probability Plot  
Sumber: Data diolah disps,2020

Dari output charts ini normal probability plot regression standardized residual dengan melihat sebaran plot digambar bahwa mengikuti arah garis diagonal meskipun sedikit menyimpang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal, sehingga uji regresi, seperti halnya capital budget dan laporan operasional terhadap transparansi terdistribusi normal.

**Tabel 4.4** Hasil Uji Statistik *kolmogorov-smirnov*

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,85687388
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,059
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah,2020

Hasil pengujian statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.4 menunjukkan bagian signifikan. Dengan nilai sebesar 0,200, artinya nilai tersebut > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

### Hasil Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dapat dilihat dengan menggunakan nilai TOL (*tolerance*) dan VIF (*variance inflation factor*) dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.5** Hasil Uji Multikolinieritas

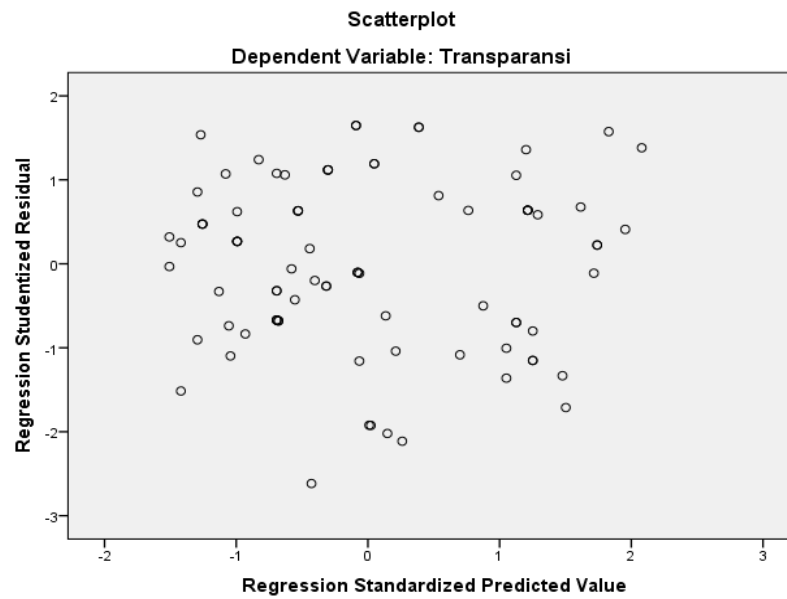
Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	17,886	3,303		5,415	,000		
	Capital Budget	,281	,068	,402	4,149	,000	,785	1,274
	Laporan Operasional	,253	,077	,317	3,274	,002	,785	1,274

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 terlihat bahwa nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,05 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari *Capital Budget* dan Laporan Operasional tidak terdapat gejala multikolinieritas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4.2** Grafik *scatterplot*

Berdasarkan gambar 4.2 tampilan pada *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Oleh karena itu maka berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengaruh variabel independen diantaranya *capital budget* yang diprosikan dengan laporan operasional terhadap variabel dependen yaitu transparansi keuangan desa. Hasil dari model regresi dilihat sebagai berikut:



**Tabel 4.6** Hasil Uji Regresi Linear Berganda**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,886	3,303		5,415	,000
<i>Capital Budget</i>	,281	,068	,402	4,149	,000
Laporan Operasional	,253	,077	,317	3,274	,002

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Data diolah spss,2020

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen diungkapkan oleh rumus berikut:

$$Y = 17,886_{b_1} + 0,281_{x_1} + 0,253_{x_2} + e$$

Dimana:

$Y$  : Transparansi Keuangan Desa

$b$  : Konstanta

$x_1$  : *Capital Budget*

$x_2$  : Laporan Operasional

$e$  : Standar eror

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial seberapa besar pengaruh antara satu variabel independen dengan variabel dependennya. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka berarti suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Variabel independen

meliputi *Capital Budget* dan Laporan Operasional, variabel dependennya yaitu Transparansi. Berikut hasil uji T sebagai berikut:

**Tabel 4.7** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,886	3,303		5,415	,000
CapitalBudget	,281	,068	,402	4,149	,000
LaporanOperasional	,253	,077	,317	3,274	,002

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Data diolah disps, 2020

Berdasarkan hasil tabel diatas, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Uji t antara *Capital Budget* dengan Transparansi menunjukkan hasil  $t_{hitung}$  4,149 >  $t_{tabel}$  1,662 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka diperoleh bahwa *Capital Budget* Secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap transparansi.
- b. Uji t antara Laporan Operasional dengan transparansi menunjukkan hasil  $t_{hitung}$  3,274 >  $t_{tabel}$  1,662 dengan nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ , maka diperoleh bahwa transparansi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap transparansi.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut hasil olah data untuk koefisien determinasi.

**Tabel 4.8** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 <sup>a</sup>	,381	,366	2,891

a. Predictors: (Constant), LaporanOperasional, *CapitalBudget*

Sumber: Data diolah disps, 2020

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan  $R^2$  diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,617 atau 61,7%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang kuat antara variabel *Capital Budget* dan Laporan Operasional terhadap Transparansi. Untuk sisanya sebesar 39,3% dijelaskan pada faktor-faktor diluar model analisis.

### 4.3 Pembahasan Dan Diskusi Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Pengaruh *Capital Budget* Terhadap Transparansi

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa *Capital Budget* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin kuat dan tinggi transparansi anggaran yang dimiliki suatu instansi pemerintah, maka akan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sehingga hal ini akan berpengaruh baik terhadap hasil pengambilan keputusan anggaran instansi pemerintah tersebut.

Dengan *Grand theory* yang mendasari *Capital Budget* yang dapat digunakan adalah teori agensi yang membahas hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama. Berdasarkan *agency theory* dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

Penelitian ini sejalan dan didukung oleh penelitian Triastuti et al., (2018) yang menyimpulkan bahwa *capital budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan inventasi aset tetap, karena sebagian besar *capital budgeting* tersebut menunjukkan bahwa investasi *asset* tetap menguntungkan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian oleh Putririnda (2020), menyimpulkan bahwa *e-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiang et al., (2018), yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Hal ini terkait dengan anggaran berbasis kinerja yakni untuk meningkatkan keefisienan dan keekonomisan suatu anggaran belanja publik. Dan penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2015), yang menunjukkan bahwa *e-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi anggaran yang efektif dan praktis diharapkan mampu berfungsi sebagai kontrol dan monitoring terhadap alokasi monitoring.

Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selanjutnya penelitian oleh Putririnda(2020) menyatakan bahwa *e-budgeting* rendahsehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansihubungan *e-budgting* tetapi tingkat pencapaian *e-budgeting* telah tercapai dengan baik dalam upaya peningkatan fungsi transparansi dan akuntabilitas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Triastuti et al., (2018) yang menunjukkan bahwa *capitalbudgeting* belum dapat meningkatkan nilai keputusan investasi yang artinya bahwa *capital budgeting* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa *capital budget* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa sekecamatan sukamaju selatan dapat diterima.

#### **4.3.2 Pengaruh Laporan Operasional Terhadap Transparansi**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa laporan operasional berpengaruh positif terhadap transparansi. Laporan Operasional merupakan penyajian ikhtiar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerinah yang diterima umum. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting, berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah

daerah maka akan berimplementasi terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

*Grend theory* yang mendasari penelitian ini adalah *accountability theory* dimana sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu maupun kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberi hukuman bilamana dikemukakan adanya penyalagunaan kewenangan tersebut.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hehanussa(2015) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan transparansi keuangan desa seperti halnya penyajian laporan operasional yang dimana anggaran ini digunakan untuk kegiatan operasional. Hal ini berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya pemerintah yang transparan terhadap masyarakat. Penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah (2012), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media dan berupa penyajian laporan keuangan dalam

kegiatan operasionalnya yang dapat diakses oleh beberapa pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliani dan Magelang(2017), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Hal ini bahwa, bagi instansi pemerintah, penyajian laporan keuangan yang didalamnya terdapat laporan operasional adalah bentuk laporan pertanggungjawaban dan transparansi atas pengelolaan dana masyarakat. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas operasinal tersebut. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Magelang(2017), menunjukkan bahwa *aksesibilitas* dan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah sudah memenuhi karakteristik yang diperlukan dalam laporan keuangan dan sudah menerapkan pengendalian internal yang baik. Tetapi masih perlu meningkatkan penyajian laporan keuangan dan *aksesibiilitas*, agar dapat meningkatkan transparansi laporan dengan memperhatikan. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiang et al., (2018), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap transparansi tetapi sudah akuntabel. Hal ini karena belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa laporan operasional berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa sekecamatan sukamaju selatan dapat diterima.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Selama periode pengamatan ini, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas bahwa hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, sehingga data yang diperoleh memenuhi persyaratan menggunakan model persamaan regresi linear berganda.

Peneliti ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel independen *Capital Budget* dan Laporan Operasional terhadap Transparansi Keuangan Desa. Hasil ini menunjukkan hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan spss 23,0 dengan 2 variabel independen dan satu variabel dependen dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian  $H_1$  yang telah diuji secara parsial menunjukkan bahwa pada desa yaitu *Capital Budget* berpengaruh positif terhadap Transparansi atau  $H_1$  dapat diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian  $H_2$  yang telah diuji secara parsial menunjukkan bahwa pada desa Laporan Operasional terhadap transparansi atau  $H_2$  dapat diterima.

#### **5.2 Saran**

Untuk meningkatkan transparansi keuangan desa, pemerintah Desa Se-kecamatan Sukamaju Selatan diharapkan dapat menyampaikan pengelolaan dana desa yang

digunakan untuk kegiatan operasional sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam melakukan penelitian ini memiliki keterbatasan adalah:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan pengisian kuesioner.
2. Waktu penelitian bertepatan dengan musibah banjir bandang masamba kabupaten luwu utara dan pandemi covid-19 sehingga tidak semua responden dapat ditemui.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aliyah, S. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Unisnu.
- Amis, J., Barney, J., Mahoney, J. T., & Wang, H. (2020). From The Editors—Why We Need A Theory Of Stakeholder Governance—And Why This Is A Hard Problem. *Academy Of Management Review*, 45(3), 499–503.
- Andini, D. T. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Pada Ud Aneka Busana Di Kediri Lombok Barat. *Edisi*, 2(2), 233–243.
- Apriliani, N. K. A., Edy Sujana, S. E., Yuniarta, G. A., & Ak, S. E. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Asropi, A. (2020). Penjelasan Teoritik Hubungan Pengukuran Kinerja Dan Akuntabilitas. *Journal Of Public Policy And Applied Administration*, 2(1).
- Dewi, M. S., Dharmawan, N. A. S., & Werastuti, D. N. S. (2015). ( Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli ). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd Ed.). Jakarta: Refika,

Aditama.

Hehanussa, S. J. (2015). Kutip 1 (Salomi J. Hehanussa ). *Conference In Busniess, Accounting And Management*, 2, 82–90.

Hendri, S., Candra, N. P. A., Rakhmawati, I., & Atikah, S. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. *Conference Management And Behavioral Studies, Issn*, 2541–3400.

Indriani, D. R. (2019). *Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bah Joga Simalungun*.

Jiang, B., Lan, S., Wilt, K., Ni, J., Yadav, R. N., Ghosh, A., ... Langen, H. H. (2018). *International Journal Of Machine Tools And Manufacture*, 5(1), 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2009.09.004>

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 5(11).

Kurniawan, P. A. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kurniawati, M. M. H. (2016). Pengaruh Penyaian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Jurnal Akuntansi*.

- Lestari, U. P. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/Jamal.2017.08.7058>
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintah Di Indonesia (Kedua)*. Bandung: Refika, Aditama.
- Nurmalia Hasanah, A. F. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Pratiwi, W. (2016). *Audit Sektor Publik*. Bogor: In Media.
- Puspaningrum, Y., & Riyardi, A. (2020). *Analisis Kapasitas Produksi Dan Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Industri Sedang Dan Besar Di Eks Karesidenan Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putririnda, V. I. (2020). *Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya*. Stie Perbanas Surabaya.
- Rigian, D., & Sari, R. P. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Journal Of Business And Information Systems (E-Issn: 2685-2543)*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.36067/Jbis.V1i1.11>
- Sapar. (2017). *Pengantar Metode Penelitian*. Makaira Printing Plus.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi

- Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Dprd Kota Jambi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.35141/jraj.v2i1.288>
- Shodiquol Amin, M., & Fitri Isnaini, N. (2019). *Pengaruh Komitmen Manajemen Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Di Pt. Hilon Felt Cabang Mojokerto*. 2(1), 39–52.
- Siregar, R. A. S. (N.D.). *Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ....
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo, Y. (2000). *Persepsi Akuntan Publik, Pemakai Informasi Akuntansi Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Advertensi Kantor Akuntan Publik (Kap)*. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Sukayasih, A., Nurnajamuddin, M., & Ramlawati, R. (2019). Pengaruh Current Ratio, Return On Asset, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Sektor Properti Dan Real Estate. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 81–88.
- Syafa'ah, L. (2019). *Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Stie Perbanas Surabaya.
- Triastuti, H., Ningsih, K., & Diba, S. F. (2018). Analisis Capital Budgeting Dalam Meningkatkan Keputusan Investasi Pada Pt . Samudera Indonesia. *Jurnal*

*Riset Akuntansi Multiparadigma (Jram)*, 5(1), 38–44.

Triputra, Y. W., & Se, E. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas.

Utary, R. A. Dan I. M. (2014). *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta: Interpena.

Wedasari, D., & Sukawijaya, I. G. N. K. (2019). Lpd Performance In Gianyar Regency: An Analysis Of Good Corporate Governance And Corporate Social Responsibility Implementation. *International Journal Of Sustainability, Education, And Global Creative Economic (Ijsegce)*, 2(3), 135–140.

Yuliani, N. L., & Magelang, U. M. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, 24(1), 1–14.